



Analisis Faktor-Faktor Penghambat Terbitnya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Keberangkatan Kapal MT. Samudra Sindo 38 di PT. Taraka Samudra Sejahtera

Ahmatul Ilmi Abdullah^{1*}, Trisnowati Rahayu², Diyah Purwitasari³, Elly Kusumawati⁴

¹Program Studi Transportasi Laut, Politeknik Pelayaran Surabaya, Indonesia

^{2,3,4}Politeknik Pelayaran Surabaya, Indonesia

*Korespondensi penulis: ahmatulilmi@gmail.com

Abstract. *Port clearance is an important document for ships that will sail. However, in practice, the issuance of port clearance often experiences problems and obstacles. This research aims to determine inhibiting factors, as well as efforts to optimize the issuance of SPB or port clearance. This research uses a qualitative research method with a descriptive data analysis technique using the fishbone method, and data collection techniques through interviews, documentation, and observations as research data. Referring to the research results, it shows that factors such as negligence in monitoring ship documents and ineffective communication cause delays in the SPB verification and issuance process, which have an impact on delayed ship departure schedules and increased operational costs. Efforts that can be made to mitigate the consequences of the delay in the departure of MT. Samudra Sindo 38 are efforts to improve ship document monitoring and improve internal and external communication to help optimize the SPB issuance process. Thus, these steps are expected to improve the efficiency and effectiveness of SPB issuance at PT. Taraka Samudra Sejahtera.*

Keywords: *Port Clearance, Fishbone, Inhibiting Factor.*

Abstrak. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau *port clearance* merupakan dokumen penting bagi kapal yang akan berlayar. Namun, dalam praktiknya, penerbitan SPB atau *port clearance* ini sering kali mengalami kendala dan hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat, serta upaya untuk mengoptimalkan penerbitan SPB atau *port clearance*. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif dengan metode *fishbone*, serta teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi sebagai data penelitian. Merujuk pada hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kelalaian dalam memonitor dokumen kapal dan kurangnya komunikasi yang efektif menyebabkan penundaan proses verifikasi dan penerbitan SPB, yang berdampak pada keterlambatan jadwal keberangkatan kapal dan bertambahnya biaya operasional. Upaya yang dapat dilakukan untuk memitigasi akibat keterlambatan keberangkatan MT. Samudra Sindo 38 adalah upaya perbaikan dalam monitoring dokumen kapal dan meningkatkan komunikasi internal dan eksternal dapat membantu mengoptimalkan proses penerbitan SPB. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerbitan SPB di PT. Taraka Samudra Sejahtera.

Kata Kunci: Surat Persetujuan Berlayar, *Fishbone*, Faktor Penghambat.

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara maju Indonesia memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, perdagangan dan transportasi tidak dapat dipisahkan begitu saja karena pengaruh besar dari faktor transportasi terhadap perkembangan kegiatan ekonomi. Usaha transportasi berperan signifikan dalam memfasilitasi penyaluran barang dari suatu daerah ke daerah lain, terutama ketika barang tersebut lebih dibutuhkan atau diperlukan di suatu wilayah. Dalam konteks ini, usaha transportasi memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam menyediakan layanan

jasa transportasi laut. Untuk perdagangan secara umum, pelayaran niaga memiliki peran yang sangat vital. Hampir semua barang perdagangan diangkut menggunakan kapal laut. (Info Maritim, Tahun 2020)

Sebelum kapal memasuki pelabuhan, mereka harus terlebih dahulu menunjuk agen perusahaan pelayaran yang telah ditetapkan oleh Pencharter. Menurut Syah (2022), Agen bertanggung jawab untuk mengurus segala aspek yang diperlukan agar kapal yang diwakilinya dapat menjalankan aktivitasnya di pelabuhan dengan tepat waktu dan lancar hingga kapal berangkat kembali ke pelabuhan tujuan selanjutnya.

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan keterlambatan keberangkatan kapal yang disebabkan oleh terlambatnya pengurusan dokumen dalam proses *clearance out* kapal seperti Surat persetujuan berlayar (SPB) atau *port clearance*. Menurut Djewed (2020), Pentingnya SPB secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Setiap kapal yang hendak keluar dari suatu pelabuhan memerlukan surat persetujuan berlayar ini untuk proses kapal yang akan keluar dari pelabuhan (*clearance out*) untuk mengatur izin pelayaran dimana kecelakaan transportasi laut masih terjadi akibat kelalaian dalam pemberian izin berlayar.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan, Surat persetujuan berlayar (SPB) atau *port clearance* adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar terhadap setiap kapal yang berlayar sebagai bentuk izin kepada kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan. SPB merupakan salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh kapal sebelum berlayar, selain persyaratan teknis dan operasional. SPB berisi informasi mengenai identitas kapal, awak kapal, muatan, tujuan, rute, dan waktu berlayar.

SPB memiliki fungsi penting dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim. Dengan adanya SPB, Syahbandar dapat melakukan pengawasan terhadap kapal yang berlayar, memastikan kapal telah memenuhi standar keselamatan dan keamanan, serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum, seperti penyelundupan, pencurian, atau pencemaran. SPB juga dapat digunakan sebagai bukti hukum apabila terjadi sengketa atau kecelakaan laut yang melibatkan kapal.

Namun, dalam praktiknya, penerbitan SPB seringkali mengalami kendala dan hambatan. Menurut Gunawan et al. (2023), Kendala dalam proses penerbitan SPB di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah kurangnya pengetahuan pemohon tentang tata cara penerbitan dokumen SPB.

Salah satu kasus yang menunjukkan adanya hambatan dalam penerbitan SPB adalah yang dialami oleh kapal MT Samudera Sindo di PT. Taraka Samudera Sejahtera. Kapal tersebut seringkali mengalami keterlambatan dalam mendapatkan SPB, seperti pada beberapa voyage 2023 dimana kapal yang diestimasikan berangkat pada tanggal 21 Januari 2023 tapi realisasinya kapal baru memiliki izin keberangkatan pada tanggal keesokan harinya yaitu 22 Januari 2023 sehingga berdampak pada keterlambatan keberangkatan, peningkatan biaya operasional, dan penurunan kinerja.

Pada salah satu kasus diatas menjelaskan bahwa kapal terkadang mengalami hambatan dalam pengurusan SPB. Menurut Budiawati & Hartanto (2020) dan Djewed (2020), menyatakan faktor penghambat dalam penerbitan SPB adalah segala sesuatu yang mengganggu dan menjadi masalah dalam proses penerbitan SPB. Hal ini tentunya akan sangat berdampak pada agen ataupun pemilik kapal dimana terlambatnya keberangkatan kapal tersebut pastinya akan terjadi pembengkakan biaya operasional.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Analisis

Analisis didefinisikan sebagai proses menguraikan suatu objek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menganalisis hubungan antar bagian tersebut (Keraf, 1994). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karangan Suharso & Retnoningsih (2005), mendefinisikannya sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk memahami keadaan yang sebenarnya. Kesimpulannya, analisis adalah proses sistematis untuk memahami suatu permasalahan dengan menguraikannya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, menganalisis hubungan antar bagian, dan melakukan penyelidikan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Dalam konteks ini, analisis akan dilakukan untuk memahami permasalahan hambatan terbitnya Surat Persetujuan Berlayar pada keberangkatan Kapal MT. Samudra Sindo 38 di PT. Taraka Samudra Sejahtera.

Pengertian Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Surat Persetujuan Berlayar Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan, Surat Persetujuan Berlayar merupakan dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar. Penerbitan SPB atau *Port Clearance* adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan muatannya

secara teknis administratif telah memenuhi dalam upaya mengoptimalkan persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.

Syarat-Syarat Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang harus di lengkapi oleh kapal yang akan berlayar adalah

- 1) Surat permohonan dari pemilik, nakhoda dan atau keagenan kapal dengan melampirkan:
 - a) Surat pernyataan nakhoda (*master sailing declaration*)
 - b) Daftar pemeriksaan kelengkapan dan validasi surat dan dokumen kapal (memorandum)
 - c) Dokumen muatan
 - d) Daftar awak kapal (*crew list*)
- 2) Bukti pelunasan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- 3) Bukti Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal (LK3)
- 4) Bukti Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK)
- 5) Bukti Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB)
- 6) *Flag State Control*
- 7) Kesehatan Pelabuhan
- 8) Bagi kapal Asing melampirkan :
 - a) *Port state control*
 - b) *Immigration clearance*
 - c) *Inward manifest*
 - d) *Outward manifest.*

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 34 Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, keselamatan kapal dapat dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Sertifikat keselamatan diberikan kepada semua jenis kapal yang berukuran lebih dari 7 GT, kecuali untuk kapal perang dan kapal negara. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 51 Tentang 2002 tentang perkapalan, kapal yang telah memperoleh sertifikat, dilakukan pengecekan secara terus-menerus sampai kapal tidak digunakan lagi artinya sertifikat-sertifikat kapal tersebut tidak berlaku bilamana masa berlaku sertifikat telah *expired*. Sertifikat kapal juga dapat dibatalkan apabila keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal, atau sertifikat diperoleh secara tidak sah.

Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tentang 2008 Tentang Pelayaran, sertifikat ini berupa sertifikat keselamatan penumpang dan barang.

Pengertian Kapal

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang dapat bergerak dengan berbagai cara, termasuk ditarik atau ditunda. Kapal ini termasuk kendaraan di bawah permukaan air dan alat apung yang tidak berpindah-pindah. Suyono (2005), mendefinisikan kapal sebagai alat transportasi untuk berlayar, baik nasional maupun asing. Kapal dapat mengangkut manusia, hewan, barang, dan tumbuhan. Kesimpulannya, kapal adalah alat transportasi air yang memiliki berbagai bentuk dan jenis, dapat bergerak dengan berbagai cara, dan digunakan untuk mengangkut berbagai macam muatan.

Jenis Kapal

Beberapa jenis Kapal menurut Undang – Undang Pelayaran Nomor. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran sebagai berikut:

- 1) Kapal Perang adalah kapal Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- 2) Kapal Negara adalah kapal milik negara digunakan oleh instansi pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan untuk menegakkan hukum serta tugas - tugas pemerintah lainnya.
- 3) Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
- 4) Kapal Barang adalah kapal yang melakukan pelayaran dengan jadwal tetap dan biasanya membawa muatan umum atau barang dalam partai yang tidak begitu besar.
- 5) Kapal Roro adalah kapal yang didesain untuk bongkar barang ke kapal di atas kendaraan roda. Kapal yang termasuk jenis RoRo antara lain kapal ferry, kapal pengangkut mobil (*car ferries*), kapal *general cargo* yang beroperasi sebagai kapal RoRo.
- 6) Kapal Tanker adalah jenis kapal laut untuk mengangkut muatan cair. Kapal jenis ini terdapat sebuah geladak dimana terdapat tangka-tangki yang tersusun secara integral maupun terpisah yang digunakan untuk mengangkut minyak curah (minyak mentah atau minyak yang sudah (didestilasi), cairan kimia, gas cair, dan sebagainya).

- 7) Kapal Kontainer adalah kapal laut untuk mengangkut muatan general cargo yang dimasukkan ke dalam container atau muatan yang perlu di bekukan dalam *reefer container*.

Keberangkatan Kapal

Keberangkatan kapal adalah kapal yang lepas dari dermaga pelabuhan dan bergerak meninggalkan perairan pelabuhan (Tarunizidat, 2018). Dokumen yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan keberangkatan kapal :

- a. Surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
- b. Kapal telah melakukan lapor tiba, Daftar Awak Kapal, Daftar Muatan (*Manifest*) dari pelabuhan asal
- c. Daftar pemeriksaan kapal sesuai PM.82 Tahun 2014, Surat Pernyataan Nahkoda (*Master Sailing Direction*) sesuai PM.82 Tahun 2014
- d. Daftar Awak Kapal dan Sertifikat Dokumen Keselamatan Pengawakan
- e. Surat Persetujuan Muatan Geladak (jika ada muatan diatas geladak)
- f. Bukti Surat Perintah Kerja Pandu (SPK) bagi kapal > 500 GT
- g. Bukti pembayaran PNBPN (SBNP) dan (VTS)
- h. Bukti Pembayaran Jasa Kepelabuhan
- i. Bukti Pembayaran Jasa Labuh dari Otoritas Pelabuhan
- j. Laporan Kedatangan dan Keberangkatan kapal dari Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan
- k. Memorandum Dokumen / Surat – Surat Kapal
- l. Daftar Muatan Kapal (*Cargo Manifest*)
- m. Bukti Rencana Pemuatan (*Stowage Plan*)
- n. Perhitungan Stabilitas (*Stability Calculation*)
- o. Bagi Kapal Asing ditambahkan dengan melampirkan:
 - 1) *Port State Control* (PSC)
 - 2) *Flag State Control* (FSG)
 - 3) *Inward Manifest*
 - 4) *Ouwart Manifest*
 - 5) *Imigration Manifest*

Perusahaan Pelayaran

Perusahaan pelayaran adalah entitas, baik milik pemerintah (BUMN) maupun swasta, yang bergerak di bidang jasa penyediaan ruang muat di kapal laut. Suwarno (2011), berpendapat tugas utama perusahaan pelayaran adalah mengangkut penumpang dan barang dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan. Jangkauan layanannya bisa domestik maupun internasional. Bentuk badan usaha perusahaan pelayaran beragam, seperti Persero (Perseroan Terbatas), Perseroan Comanditer (CV), dan lain sebagainya. Tujuan didirikannya perusahaan pelayaran adalah untuk memperlancar arus barang dan manusia melalui jalur laut, mendukung perdagangan, dan meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Definisi Optimal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik.

Menurut Nurrohman (2017), Optimalisasi adalah upaya meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut. Jadi optimalisasi disini mempunyai arti berusaha secara optimal untuk hasil yang terbaik untuk mencapai dalam penerapan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah direncanakan

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuannya untuk menggambarkan secara detail dan mendalam keunikan individu, kelompok, komunitas, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi situasi sosial yang diteliti secara menyeluruh dan kontekstual. Moleong (2009). Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Desain ini memfokuskan pada penggambaran dan penjelasan fenomena yang diteliti. Data dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang individu atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian ini juga diharapkan

dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan, seperti akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama peneliti melaksanakan Praktek Darat (PRADA) yang merupakan salah satu syarat dalam pemenuhan program Diploma IV yang ditempuh peneliti dari 26 Juli 2022 sampai dengan 26 Juli 2023.

2. Lokasi Penelitian

Alamat Kantor PT. TARAKA SAMUDRA SEJAHTERA

- a. Office : Jl. Perak Timur No. 316 Perak Utara, Pabean
Cantikan Surabaya 60165, Jawa Timur-Indonesia
- b. Phone : (031) 990 – 25056
- c. Email : info@taraka.co.id
- d. Berikut lokasi kantor PT. Taraka Samudra Sejahtera dilihat dari google earth :



Sumber: Google Earth 2024

Gambar 1. Lokasi Penelitian

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2018), Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Ada dua jenis data yang peneliti ambil dalam penelitian ini yaitu adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber langsung, baik individu maupun kelompok. Data ini dapat diperoleh

melalui berbagai cara, seperti wawancara atau kuisioner. Dalam penelitian ini, data primer akan dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak pegawai kantor PT. Taraka Samudra Sejahtera.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini biasanya diperoleh melalui studi kepustakaan dan literatur, seperti catatan laporan kapal, buku, jurnal, dan bentuk tulisan lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Keabsahaan Data

Menurut Zuldafrial (2012), keabsahan data merupakan konsep dari kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi penelitian kuantitatif dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kriteria, dan paradigma sendiri.

Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan Triangulasi Sumbet. Menurut Sugiyono (2007), Triangulasi Sumber adalah mengarahkan peneliti dalam mengambil data menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda. Teknik Triangulasi Sumber dapat menggunakan satu jenis sumber data misalnya informan, tetapi beberapa informan yang digunakan perlu diusahakan posisinya dari tingkatan yang berbeda-beda. Teknik triangulasi sumber dapat pula dilakukan dengan menggali informasi dari sumber-sumber data yang berbeda jenisnya, misalnya wawancara, observasi, dokumentasi dan catatan atau dokumen.

Teknik Analisis Data

Menurut Hamidi (2010), Analisis data adalah menetapkan tahap-tahap, langkah-langkah kegiatan terhadap data yang sedang dan sudah dikumpulkan, dengan tujuan untuk menarik kesimpulan.

Analisis data merupakan bagian penting dalam penelitian ilmiah. Dengan analisis data, penelitian dapat memberikan arahan dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah penelitian. Teknik analisis yang Peneliti gunakan adalah analisis *Fishbone*. Analisis ini dalam bentuk diagram. Diagram *Fishbone* dikembangkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa. Diagram ini bentuknya menyerupai kerangka tulang ikan yang bagian - bagiannya meliputi kepala, sirip, dan duri. Diagram *fishbone* digunakan pada proses mengidentifikasi suatu permasalahan dan menentukan penyebabnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum PT. Taraka Samudra Sejahtera Surabaya

PT. Taraka Samudra Sejahtera Surabaya merupakan perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 2013 yang bertempat di Jl. Perak Timur No. 316 Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya, Jawa Timur. Dengan kapasitas keahlian yang dimiliki oleh team pada saat itu, PT. Taraka Samudra Sejahtera telah memulai keterlibatannya dalam Proyek Lepas Pantai PETRONAS di perairan Ketapang dengan berperan sebagai agen kapal selam. Peran ini termasuk memberikan dukungan kepada berbagai instansi dengan memfasilitasi pengoperasian kapal domestik dan asing yang telah disewa untuk proyek tersebut.

Di akhir tahun 2013, PT. Taraka Samudra Sejahtera memulai penajajakan operasi Bongkar Muat yang bertujuan untuk memfasilitasi bongkar muat kargo, dengan fokus khusus pada operasi pengangkatan berat. PT. Taraka Samudra Sejahtera merintis merambah Bisnis Perkapalan di ranah transportasi tug and barge, serta LCT to Carriers untuk beragam Kargo Curah dan Kargo Berat, usaha yang masih bertahan hingga saat ini.

Mencoba untuk mengembangkan bisnis, PT. Taraka Samudra Sejahtera mencoba berbisnis dibidang pelayaran. Perusahaan memulai dengan bisnis pengiriman barang curah, material proyek, pekerjaan lepas pantai dan manajemen kapal. Jenis-jenis layanan yang ditawarkan oleh bisnis pelayaran ini adalah Ship Owning, Shipping Operator, Bulk Carrier, Offshore Shipping, Ship Management dan Crewing and Manning.

Visi dan Misi PT. Taraka Samudra Sejahtera Surabaya

a. Visi PT. Taraka Samudra Sejahtera Surabaya

Untuk memantapkan dirinya sebagai perusahaan transportasi dan logistik terkemuka dan mahir di Indonesia, perusahaan bertujuan untuk mencapai kedudukan yang profesional, dapat diandalkan, dan sangat kompetitif.

b. Misi PT. Taraka Samudra Sejahtera Surabaya

- 1) Memberikan pelayanan terbaik untuk kepuasan pelanggan.
- 2) Mampu berkompetisi dengan bekerja professional, kreatif, efektif dan efisien.
- 3) Dapat menjadi mitra yang terpercaya dengan kerjasama bisnis yang saling menguntungkan.

Hasil Penelitian

Penelitian ini menyajikan data dalam bentuk observasi, wawancara, serta dokumentasi.

1) Hasil Observasi

Adapun berikut tabel *vessel daily report* dari kapal MT. Samudra Sindo 38 milik PT. Taraka Samudra Sejahtera sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel *Vessel Daily Report*

No. Voy	Activity	ETD	Realisasi	ETA	Realisasi
01/23	<i>Sailing to POL</i> Halmahera	21 Januari 2023	22 Januari 2023	28 Januari 2023	28 Januari 2023
	<i>Sailing to POD</i> Gresik	02 Februari 2023	02 Februari 2023	08 Februari 2023	10 Februari 2023
02/23	<i>Sailing to POL</i> Merauke	25 Februari 2023	26 Februari 2023	08 Maret 2023	09 Maret 2023
	<i>Sailing to POD</i> Bontang	15 Maret 2023	16 Maret 2023	28 Maret 2023	26 Maret 2023
03/23	<i>Sailing to POL</i> Halmahera	05 April 2023	07 April 2023	10 April 2023	10 April 2023
	<i>Sailing to POD</i> Gresik	15 April 2023	16 April 2023	22 April 2023	23 April 2023
04/23	<i>Sailing to POL</i> Demta	28 Mei 2023	29 Mei 2023	17 Juni 2023	20 Juni 2023
	<i>Sailing to POD</i> Tarjun	27 Mei 2023	28 Juni 2023	19 Juli 2023	19 Juli 2023

Sumber: *Vessel Daily Report* MT. Samudra Sindo 38 Voyage 1-4 2023

Tabel 1 menunjukkan data perbandingan antara rencana dan realisasi waktu keberangkatan (ETD) dan waktu tiba (ETA) untuk kapal Samudra Sindo 38 yang diageni oleh PT. Taraka Samudra Sejahtera pada beberapa voyage di tahun 2023. Dari tabel tersebut, terdapat beberapa pola keterlambatan yang perlu dianalisis lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Keterlambatan pada waktu keberangkatan (ETD) terlihat cukup konsisten pada beberapa voyage. Misalnya, pada voyage 01/23 untuk aktivitas "Sailing to POL Halmahera," kapal berangkat sehari lebih lambat dari yang direncanakan. Keterlambatan serupa juga terjadi pada voyage 02/23 untuk aktivitas "Sailing to POL Merauke" dan voyage 03/23 untuk aktivitas "Sailing to POL Halmahera" dengan masing-masing mengalami keterlambatan 1 dan 2 hari. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam perencanaan atau kesiapan kapal yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor.

Berdasarkan hasil observasi peneliti yang ada di lapangan, ditemukan bahwa keterlambatan yang terjadi disebabkan karena faktor kurangnya ketelitian dalam pengecekan dokumen kapal yang harus di diserahkan kepada KSOP Kelas II Gresik untuk permohonan *Clearance Out*, saat itu MT. Samudra Sindo 38 telah selesai melaksanakan bongkar muatan di pelabuhan gresik dan ingin mengajukan permohonan SPB untuk melanjutkan perjalanan, ketika pengajuan permohonan SPB telah dilakukan, dari pihak otoritas pelabuhan memverifikasi terkait adanya dokumen persyaratan yang *expired* hal ini bisa terjadi karena kurangnya memerhatikan masa berlaku dokumen kapal, sehingga menyebabkan pihak agen dalam hal ini PT.Taraka Samudra Sejahtera harus melakukan upload ulang dengan mengupdate dokumen yang *expired* tersebut terlebih dahulu, yaitu dokumen Rencana Pola Trayek (RPT) kapal MT. Samudra Sindo 38 dikarenakan kelalaian pemohon tersebut maka memerlukan waktu tambahan untuk proses update dokumen persyaratan terlebih dahulu. Serta adapun juga proses perizinan SPB pada keberangkatan MT. Samudra Sindo 38 yang di tunda karena kondisi sedang cuaca buruk dan terpaksa kapal berangkat dengan tidak sesuai keinginan, sehingga dari kendala kendala tersebut berdampak pada keterlambatan keberangkatan kapal

Berdasarkan observasi peneliti juga mendapati kendala dalam proses penerbitan SPB seperti terjadinya salah input data pada sistem Inaportnet yang diakibatkan oleh *human error*, yaitu tidak teliti dalam proses input data kapal sehingga harus melakukan upload ulang untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Peneliti juga mendapati terjadinya *error* dari server Inaportnetnya sehingga tidak bisa melakukan proses permohonan penerbitan SPB dikarenakan adanya *maintenance* secara tidak terduga, hal ini cukup merepotkan dimana saat kapal ingin segera berangkat dan proses penerbitan SPB ingin segera diselesaikan, tetapi hal tersebut terpaksa mengalami keterlambatan dimana kita harus menunggu beberapa saat sampai gangguan pada server Inaportnet tersebut selesai.

Peneliti juga mendapati kendala lain dalam observasi yang pernah dialami, yaitu peneliti mengalami kendala akses pada lisensi perangkat lunak *Ms.Outlook* untuk *mailing* kepada pihak terkait operasional kapal seperti pemilik muatan, pengirim muatan, pemilik kapal dan lainnya untuk koordinasi dalam proses keberangkatan kapal. Hal diakibatkan karena lisensi perangkat lunak tersebut yang kurang diperhatikan serta memerlukan perawatan secara berkala untuk kelancaran operasional. Kendala-kendala ini lah yang menjadi faktor penyebab keterlambatan penerbitan SPB yang menyebabkan kapal MT Samudra Sindo 38 mengalami kemunduran jadwal keberangkatan dari Pelabuhan Gresik.

2) Hasil Wawancara

Pada kesempatan ini sumber informasi yang peneliti amati diperoleh dari hasil wawancara dengan Manager Operasional, Kepala Koordinator dan Staff Lapangan. Yang mana hasil wawancara berikut dilaksanakan pada saat peneliti selesai melaksanakan Praktik Darat di PT. Taraka Samudra Sejahtera. Berikut disajikan hasil wawancaranya:

- a. Hasil informasi yang didapat dari jawaban narasumber 1 sebagaimana yang terdapat pada lampiran 3:

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Bapak Riko Syahrully selaku Manager Operasional, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa tahapan dan kendala dalam proses penerbitan SPB. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pemilik kapal ke kantor Syahbandar, diikuti oleh pemeriksaan administrasi dan teknis terhadap kapal. Dokumen yang diperlukan meliputi sertifikat keselamatan kapal, daftar awak kapal (*crew list*), Rencana Pola Trayek (RPT), *cargo manifest*, dan SPB dari pelabuhan asal.

Hambatan yang sering terjadi meliputi dokumen yang tidak lengkap atau tidak valid seperti dokumen *Safe Manning*, *Liferaft*, *Load Line* dan lain-lain serta, masalah teknis pada kapal, serta kondisi cuaca buruk. Dampak dari hambatan ini termasuk penundaan keberangkatan, peningkatan biaya operasional, dan penurunan reputasi perusahaan pelayaran. Untuk mengatasi hambatan tersebut, perusahaan harus memastikan kelengkapan dan kevalidan dokumen, menjaga pemeliharaan kapal, memantau kondisi cuaca secara real-time, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait. Langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi penerbitan SPB di PT. Taraka Samudra Sejahtera mencakup pelatihan rutin bagi staf, serta penguatan sistem manajemen dokumen dan komunikasi antar departemen.

- b. Hasil informasi yang didapat dari jawaban narasumber 2 sebagaimana yang terdapat pada lampiran 4:

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Bapak Hendra Priyantoko selaku Koordinator Lapangan, dapat disimpulkan bahwa proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di KSOP Kelas II Gresik melibatkan beberapa tahapan penting yang memerlukan koordinasi dan kepatuhan terhadap aturan yang ketat. Tahapan pertama adalah pemeriksaan dokumen kapal, termasuk sertifikat keselamatan, sertifikat pencegahan polusi, dan dokumen lainnya. Setelah dokumen

diperiksa, dilakukan inspeksi fisik oleh petugas Syahbandar untuk memastikan kondisi kapal, peralatan keselamatan, dan kesiapan awak kapal. Selanjutnya, dilakukan pengecekan muatan untuk memastikan kesesuaian dengan *manifest* dan kapasitas yang diizinkan. Setelah semua tahapan selesai, Syahbandar menerbitkan SPB sebagai izin resmi bahwa kapal siap berlayar.

Hambatan dalam proses ini meliputi masalah dokumen yang tidak lengkap atau tidak diperbarui, masalah teknis pada kapal, kondisi cuaca buruk, ketidak stabilan internet, kurangnya koordinasi atau komunikasi antara pihak terkait,. Dampak dari hambatan ini dapat berupa penundaan keberangkatan, gangguan logistik dan rantai pasokan, serta peningkatan biaya operasional dan penurunan kesejahteraan kru kapal. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan pengecekan dokumen secara berkala, pemeliharaan kapal yang rutin, penggunaan teknologi prediksi cuaca, serta peningkatan koordinasi dan digitalisasi administrasi. Bapak Hendra juga menyarankan peningkatan kompetensi staff, penyederhanaan prosedur, dan audit berkala untuk meningkatkan efisiensi proses penerbitan SPB.

- c. Hasil informasi yang didapat dari jawaban narasumber 3 sebagaimana yang terdapat pada lampiran 5:

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Bapak Sugiyanto selaku Staff Operasional, dapat disimpulkan bahwa penerbitan SPB melibatkan beberapa tahapan yang harus dilakukan dengan cermat. Tahapan pertama adalah memastikan semua dokumen kapal dalam kondisi siap dan tidak kadaluarsa. Setelah itu, dilakukan pengecekan fisik kapal serta penyesuaian muatan dengan *manifest*. Pemeriksaan karantina kesehatan dan pembayaran pajak PNBPN juga merupakan bagian dari proses ini. Setelah semuanya lengkap, petugas Syahbandar akan memberikan tanda tangan untuk penerbitan SPB, dan dokumen tersebut bersama dokumen kapal lainnya harus dinaikkan ke kapal dan diperiksa ulang oleh *second officer*.

Hambatan yang sering terjadi menurut bapak Sugiyanto ini meliputi kelalaian dalam manajemen dokumen, pernah terjadi kendala pada server sehingga akses permohonan SPB terhambat, perhitungan muatan yang tidak sesuai dan kondisi kapal yang tidak laik laut seperti, kondisi mesin yang rusak dan tangki muatan yang bocor. Hambatan ini dapat menyebabkan penundaan keberangkatan kapal, kerugian finansial bagi perusahaan, dan penurunan reputasi perusahaan di mata konsumen. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Bapak Sugiyanto menekankan

pentingnya koordinasi agar tidak ada dokumen yang hilang atau kadaluarsa, *maintenance* server agar tidak mengganggu akses operasional. Selain itu, pengecekan rutin kondisi kapal dan pengukuran muatan yang akurat juga sangat penting.

Untuk meningkatkan efisiensi proses penerbitan SPB, diperlukan evaluasi berkala melalui *monthly meeting* untuk membahas kendala yang terjadi dan rencana perbaikan ke depan. Peningkatan kekompakan tim, baik di kantor maupun kru kapal, serta pelatihan berkala untuk staf mengenai teknologi baru dan regulasi terbaru juga sangat penting. Pak Sugiyanto juga menekankan pentingnya menjalin kerjasama yang lebih baik dengan pihak Syahbandar dan pelabuhan untuk mempercepat proses verifikasi dan inspeksi.

3) Dokumentasi

Dokumentasi penelitian didapatkan peneliti dari keterlibatan peneliti dalam pengurusan MT. Samudra Sindo 38 ketika melakukan kegiatan di pelabuhan Gresik yang diageni oleh PT. Taraka Samudera sejahtera. selama melakukan studi lapangan, peneliti menganalisis terkait dengan proses kapal masuk sampai dengan kapal selesai melakukan kegiatan dan bersiap untuk keluar kembali dari pelabuhan Gresik.

Berdasar hasil observasi, peneliti memberikan gambaran terkait prosedur penerbitan SPB sebagai syarat kapal melanjutkan pelayaran berikutnya setelah melaksanakan kegiatan di pelabuhan Gresik, yaitu :

a. Dokumen yang harus dipersiapkan oleh PT Taraka Samudera Sejahtera

- 1) Dokumen untuk Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
 - a) Kwitansi pembayaran labuh
 - b) Kwitansi pembayaran *Vessel Traffic Service* (VTS)
 - c) Surat izin berlayar karantina kesehatan
 - d) Surat Permohonan Penerbitan SPB
 - e) *Crew List*
 - f) Surat Pernyataan Nakhoda (*Master Sailing Declaration*)
- 2) Dokumen Kelengkapan Kapal
 - a) Surat Ukur/*International Tonnage Certificate*
 - b) Surat Laut
 - c) *Document Of Compliance* (DOC)
 - d) Sertifikat Kebangsaan/*Certificate of Registry*

- e) Sertifikat Perlengkapan Keselamatan Kapal Barang (*Cargo Ship Safety Equipment Certificate*)
 - f) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang
 - g) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang
 - h) Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP)
- 3) Alur Proses *Clearance Out* Kapal
- a) Pengajuan Layanan Keberangkatan Kapal

Agen membuat pemberitahuan keberangkatan kapal kepada pihak Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) melalui sistem Inaportnet.
 - b) Pengajuan dan Verifikasi Dokumen

Agen mengajukan dokumen keberangkatan kapal yang mencakup Laporan Kegiatan Kapal (LKK) dan Laporan Kegiatan Kunjungan Kapal (LK3). kemudian KSOP akan memverifikasi dokumen tersebut dan menerbitkan Kode *Billing* untuk Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - c) Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Agen melakukan pembayaran PNBP menggunakan Kode Billing yang telah diterbitkan.
 - d) Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Setelah pembayaran selesai, KSOP akan memverifikasi data dan menerbitkan SPB. SPB yang telah terbit akan diserahkan kepada agen dan nakhoda kapal.
 - e) Keberangkatan Kapal

Setelah SPB diterbitkan, kapal dapat berangkat meninggalkan pelabuhan dan menuju pelabuhan berikutnya.



Sumber: Dokumen Peneliti 2023

Gambar 2. Proses keberangkatan kapal



Sumber: Dokumen Peneliti 2023

Gambar 3. Proses pengecekan kondisi fisik kapal

4) Studi Literatur

Hasil studi literatur yang diambil dari penelitian Djewed Noval (2020) sebagaimana yang terdapat pada *review* penelitian terdahulu yang berjudul “Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai” yaitu Proses Penerbitan SPB meliputi permohonan penerbitan SPB, pemeriksaan berkas administrasi dan fisik kapal, serta penerbitan SPB.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerbitan SPB terdiri dari faktor pendukung seperti faktor hukum dan koordinasi serta faktor penghambat seperti sumber daya manusia dan ketidak cermatan pemohon, dalam melengkapi persyaratan dan dokumen kapal.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa prosedur penerbitan SPB Kapal Perikanan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai melibatkan berbagai tahapan yang harus diikuti, dan faktor-faktor tertentu dapat mempengaruhi proses penerbitan tersebut.

Analisis Data

Tujuan dari analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk lebih mudah dibaca dan diinterpretasi yang seringkali menggunakan deskriptif kualitatif sebagai alatnya. Dan pada umumnya menggunakan metode triangulasi sebagai metode yang menjamin kredibilitas data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber berikut rinciannya:

Tabel 1. Triangulasi Sumber

No	Tema Utama	Hasil Wawancara	Hasil Observasi & Dokumentasi	Hasil Studi Literatur	Kesimpulan
1	Proses Penerbitan SPB	Tahapan proses penerbitan SPB melibatkan beberapa dokumen penting yang harus dipenuhi seperti dokumen <i>Safe manning</i> , <i>Life Raft</i> , <i>Load line</i> dan lain-lain.	Observasi menunjukkan beberapa masalah, seperti kelalaian dalam memonitor dokumen kapal dan kurangnya komunikasi efektif antar pihak terkait.	Literatur menyebutkan pentingnya monitoring dokumen yang ketat dan komunikasi yang efektif untuk menghindari keterlambatan.	Proses penerbitan SPB memerlukan pemenuhan dokumen yang ketat dan komunikasi yang baik untuk menghindari masalah.
2	Faktor Penghambat	Beberapa faktor penghambat meliputi kelalaian dalam pemeriksaan administrasi, kurangnya sarana dan prasarana memadai	Observasi menemukan adanya masalah dalam sistem manajemen dokumen internal dan kurangnya sarana-prasarana yang memadai.	Literatur mendukung temuan bahwa faktor-faktor seperti kelalaian administrasi dan kurangnya fasilitas dapat menghambat proses.	Faktor penghambat utama adalah kelalaian administrasi, kurangnya sarana-prasarana, dan ketidakdisiplinan
3	Dampak Hambatan	Hambatan-hambatan ini menyebabkan keterlambatan jadwal keberangkatan kapal dan peningkatan biaya operasional.	Observasi mencatat adanya keterlambatan dalam jadwal keberangkatan dan peningkatan biaya karena masalah administratif seperti biaya labuh / sandar.	Literatur menjelaskan bahwa hambatan administratif dapat meningkatkan biaya operasional dan menyebabkan keterlambatan.	Hambatan dalam proses penerbitan SPB menyebabkan keterlambatan keberangkatan dan peningkatan biaya operasional.

Sumber: Data Peneliti yang Diolah 2024

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data pada proses penerbitan SPB diatas dengan beberapa langkah analisis berdasarkan metode penelitian yang digunakan yaitu :

1. Melakukan identifikasi masalah pada proses penerbitan SPB.
2. Penetapan masalah utama dan akar penyebabnya.
3. Penetapan target penanggulangan.

Dalam proses identifikasi masalah yang pertama adalah menemukan persoalan, dan tugas yang kedua adalah memilih persoalan dari banyak alternatif persoalan yang telah ditemukan. Berikut hasil identifikasi masalah yang diperoleh berdasarkan hasil analisis peneliti sebagai berikut:

Tabel 2. Identifikasi Masalah

Faktor yang diamati	Masalah yang terjadi	Akar Penyebab
<i>Man</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kelalaian dalam memonitor dokumen kapal (hal. 51) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidaktelitian dalam memantau dokumen persyaratan
<i>Method</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Komunikasi Efektif. (hal. 50) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya rapat koordinasi
<i>Machine</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Gangguan pada server yang digunakan untuk proses penerbitan SPB. (hal. 51) • Keterbatasan akses ke perangkat lunak yang diperlukan untuk verifikasi data kapal. (hal. 51) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya <i>maintenance</i> secara berkala • Lisensi perangkat lunak yang kurang diperhatikan
<i>Material</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen yang tidak lengkap atau tidak valid. (hal. 46,49) • Keterlambatan untuk update dokumen yang diperlukan untuk penerbitan SPB. (hal. 50) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya memperhatikan masa berlaku dokumen kapal • Kurangnya sistem pengingat dan monitoring dokumen yang efektif.
<i>Measurement</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kesalahan dalam pengukuran atau pencatatan data teknis kapal. (hal. 51) • Ketidakakuratan data kapal yang diinput ke dalam sistem karena human error. (hal. 51) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman staf mengenai prosedur pengukuran yang benar dan ketidak telitian dalam pencatatan tersebut • Kurang fokus dalam proses input data
<i>Environment</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi cuaca buruk yang menghambat pemeriksaan kapal dan izin berlayar. (hal. 49,50) • Ketidakstabilan internert di pelabuhan yang mengganggu operasional sistem elektronik dan komunikasi. (hal. 50) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menggunakan sistem prediksi cuaca yang baik • Infrastruktur internet di pelabuhan yang kurang memadai.

Sumber: Data Peneliti yang diolah 2024

Pembahasan

1. Hambatan yang mempengaruhi penerbitan SPB dalam keberangkatan kapal MT. Samudra Sindo 38

Berdasarkan *fishbone chart* pada gambar 4.5 yang didapat dari proses observasi dan wawancara dengan narasumber terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi keberangkatan kapal MT. Samudra Sindo 38 yaitu:

a. Faktor *Man*

- 1) Kelalaian dalam memonitor dokumen kapal. Sebagaimana yang terdapat pada hasil observasi dan wawancara pada lampiran 4:

Kelalaian dalam memonitor dokumen kapal yang sering terjadi ketika pegawai PT. Taraka Samudra Sejahtera yang bertanggung jawab tidak teliti dan akurat memantau, memeriksa, dan mengelola dokumen yang diperlukan untuk proses permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Masalah ini disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap detail dokumen yang tidak terpantau dengan baik bisa menyebabkan dokumen persyaratan tersebut tidak valid dan terjadi penundaan dalam proses verifikasi dan penerbitan SPB, mengakibatkan kapal tidak bisa berangkat sesuai jadwal.

b. Faktor *Method*

- 1) Kurangnya Komunikasi Efektif. Sebagaimana yang terdapat pada hasil wawancara pada lampiran 4:

Kurangnya komunikasi efektif ini terjadi ketika informasi penting yang terkait dengan proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak disampaikan dengan efektif di antara pihak-pihak yang terlibat seperti KSOP & keagenan kapal yang terkadang menyebabkan terjadinya miskomunikasi. Ini mencakup komunikasi internal di antara petugas pelabuhan serta komunikasi eksternal antara pelabuhan, agen kapal, dan pihak lain yang berkepentingan.

c. Faktor *Machine*

- 1) Gangguan pada server yang digunakan untuk proses penerbitan SPB. Sebagaimana yang terdapat pada hasil observasi dan wawancara pada lampiran 5:

Gangguan pada server Inaportnet yang digunakan untuk proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terjadi ketika server yang

menyimpan dan mengelola data terkait penerbitan SPB mengalami kerusakan, gangguan jaringan, atau kegagalan sistem. Gangguan semacam ini bisa menyebabkan tidak tersedianya akses ke data yang diperlukan atau bahkan menghentikan sepenuhnya proses penerbitan SPB.

- 2) Keterbatasan akses ke perangkat lunak khusus yang diperlukan untuk verifikasi data kapal. Sebagaimana yang terdapat pada hasil observasi dan wawancara pada lampiran 5 :

Keterbatasan akses ke perangkat lunak yang diperlukan untuk verifikasi atau koordinasi kapal terjadi ketika pegawai tidak dapat menggunakan atau mengakses perangkat lunak tertentu untuk memverifikasi dokumen dan data kapal yang dibutuhkan. Hal ini bisa disebabkan seperti keterbatasan lisensi, atau masalah teknis yang menghalangi akses. Seperti yang pernah dialami peneliti yang mengalami kendala akses pada lisensi perangkat lunak *Ms.Outlook* untuk *mailing* kepada pihak terkait operasional kapal seperti pemilik muatan, pengirim muatan, pemilik kapal dan lainnya untuk koordinasi dalam proses keberangkatan kapal.

d. Faktor *Material*

- 1) Dokumen yang tidak lengkap atau tidak valid. Sebagaimana yang terdapat pada hasil observasi dan wawancara pada lampiran 3 :

Masalah dokumen yang tidak lengkap atau tidak valid terjadi ketika dokumen yang diperlukan untuk proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak diserahkan secara lengkap atau terdapat kesalahan dalam isi dokumen tersebut. Dokumen yang dimaksud bisa mencakup sertifikat keselamatan, daftar awak kapal, surat ukur, surat laut, buku kesehatan kapal serta berbagai izin dan persetujuan lainnya yang diwajibkan oleh regulasi maritim. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak valid harus diperbaiki atau dilengkapi, yang menyebabkan penundaan dalam proses penerbitan SPB.

- 2) Keterlambatan update dokumen yang diperlukan untuk penerbitan SPB. Sebagaimana yang terdapat pada hasil wawancara pada lampiran 4 :

Keterlambatan dalam memperbarui dokumen yang diperlukan untuk penerbitan SPB ini ada hubungannya dengan faktor man yaitu kelalaian memonitor dokumen kapal dimana tidak patuh untuk segera update dokumen kapal yang akan mati Keterlambatan dalam memperbarui dokumen

menyebabkan penundaan dalam proses penerbitan SPB, sehingga kapal tidak dapat berangkat sesuai jadwal.

e. Faktor *Measurement*

- 1) Kesalahan dalam pengukuran atau pencatatan data teknis kapal. Sebagaimana yang terdapat pada hasil wawancara pada lampiran 5 :

Kesalahan dalam pengukuran atau pencatatan data teknis kapal terjadi pada data yang berkaitan dengan ukuran, kapasitas, kondisi teknis, atau performa kapal dicatat secara tidak akurat atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kesalahan terjadi saat proses pengukuran fisik di lapangan atau saat pencatatan dan pelaporan data ke sistem administrasi. Ketidakakuratan data teknis memerlukan verifikasi ulang dan koreksi, yang menyebabkan penundaan dalam proses penerbitan SPB.

- 2) Ketidak akuratan data yang diinput ke sistem karena human error. Sebagaimana yang terdapat pada hasil observasi dan wawancara pada lampiran 5:

Ketidakkuratan data kapal yang diinput ke sistem karena *human error* adalah masalah yang terjadi ketika data teknis kapal, seperti spesifikasi kapal, sertifikat kapal, data crew kapal (*crewlist*) atau informasi tentang kondisi kapal, dimasukkan ke dalam sistem dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat terjadi selama proses entri data manual, di mana petugas melakukan kesalahan ketik atau salah input informasi. Kesalahan data yang diinput perlu diperbaiki atau diverifikasi ulang, yang menyebabkan penundaan dalam proses penerbitan SPB.

f. Faktor *Environment*

- 1) Kondisi cuaca buruk yang menghambat pemeriksaan kapal dan izin berlayar. Sebagaimana yang terdapat pada hasil observasi dan wawancara pada lampiran 3 dan 4:

Kondisi cuaca buruk, seperti badai, hujan lebat, angin kencang, atau gelombang tinggi, dapat secara signifikan menghambat proses pemeriksaan kapal dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Cuaca buruk ini bisa menyebabkan penundaan atau pembatalan pemeriksaan kapal oleh petugas pelabuhan dan otoritas terkait, serta mengganggu komunikasi dan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam proses penerbitan SPB. Pemeriksaan kapal yang tertunda atau dibatalkan akibat cuaca buruk menyebabkan penundaan

dalam penerbitan SPB, sehingga kapal tidak dapat berangkat sesuai jadwal.

- 2) Ketidakstabilan internet di pelabuhan yang mengganggu operasional sistem elektronik dan komunikasi. Sebagaimana yang terdapat pada hasil wawancara pada lampiran 4:

Ketidakstabilan internet di pelabuhan adalah masalah yang terjadi ketika koneksi internet yang diperlukan untuk operasional sistem elektronik dan komunikasi tidak konsisten atau sering terputus. Ketidakstabilan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor lingkungan, infrastruktur yang kurang memadai, atau gangguan teknis lainnya. Dalam konteks penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), ketidakstabilan internet dapat menghambat proses administratif, verifikasi data, dan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat. Ketidakstabilan internet menyebabkan penundaan dalam akses dan pengolahan data yang diperlukan untuk penerbitan SPB di inaportnet, sehingga proses menjadi lebih lambat.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerbitan SPB

Dari hasil analisis yang dilakukan dan penyebab masalah yang ditemukan peneliti dapat menentukan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerbitan SPB, yaitu:

a. Man:

- 1) Meningkatkan pelatihan dan pengawasan bagi petugas yang menangani penerbitan SPB untuk meningkatkan ketelitian dan perhatian dalam memantau, memeriksa, dan mengelola dokumen.

b. Method:

- 1) Meningkatkan komunikasi internal dan eksternal antar pihak yang terlibat dalam proses penerbitan SPB, termasuk KSOP, agen kapal, dan pihak lain yang berkepentingan.

c. Machine:

- 1) Melakukan perawatan dan pemeliharaan server yang digunakan untuk proses penerbitan SPB secara berkala untuk mencegah kerusakan dan gangguan jaringan.
- 2) Memastikan ketersediaan lisensi dan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung akses ke perangkat lunak verifikasi data kapal.

d. *Material*:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pihak yang bertanggung jawab atas penyiapan dokumen untuk penerbitan SPB untuk memastikan kelengkapan dan validitas dokumen.
- 2) Membangun sistem pengingat dan monitoring untuk memperbarui dokumen penting terkait penerbitan SPB tepat waktu.

e. *Measurement*:

- 1) Meningkatkan standar dan pemahaman pengukuran dan pencatatan data teknis kapal untuk memastikan akurasi data.
- 2) Melakukan kontrol kualitas data dan verifikasi ulang data kapal yang diinput ke dalam sistem untuk meminimalkan kesalahan *human error*.

f. *Environment*:

- 1) Memanfaatkan teknologi dan sistem online untuk mengoptimalkan proses pemeriksaan kapal dan penerbitan SPB, sehingga tidak terhambat oleh kondisi cuaca buruk.
- 2) Meningkatkan infrastruktur jaringan internet di pelabuhan untuk memastikan koneksi yang stabil dan lancar.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai analisis faktor-faktor penghambat terbitnya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada keberangkatan kapal MT. Samudra Sindo 38 di PT. Taraka Samudra Sejahtera, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat Penerbitan SPB

- a. *Man*: Kelalaian dalam memonitor dokumen kapal.
- b. *Method*: Kurangnya komunikasi efektif antara KSOP, agen kapal, dan petugas pelabuhan.
- c. *Machine*: Gangguan pada server Inaportnet.
- d. *Material*: Ketidaklengkapan atau ketidakvalidan dokumen, seperti dokumen *expired*.
- e. *Measurement*: Kesalahan dalam pengukuran atau pencatatan data teknis kapal
- f. *Environment*: Kondisi cuaca buruk dan ketidakstabilan internet di pelabuhan

2. Upaya Mengoptimalkan Penerbitan SPB

- a. *Man*: Meningkatkan pelatihan dan pengawasan bagi petugas untuk meningkatkan ketelitian dan perhatian dalam memantau, memeriksa, dan mengelola dokumen.
- b. *Method*: Meningkatkan komunikasi internal dan eksternal antar pihak yang terlibat dalam proses penerbitan SPB, dan membangun sistem komunikasi yang efektif.
- c. *Machine*: Melakukan perawatan dan pemeliharaan server secara berkala untuk mencegah kerusakan dan gangguan jaringan.
- d. *Material*: Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pihak yang bertanggung jawab atas penyiapan dokumen untuk memastikan kelengkapan dan validitas dokumen. Serta membangun sistem pengingat dan monitoring untuk memperbarui dokumen penting tepat waktu.
- e. *Measurement*: Meningkatkan standar dalam pencatatan data teknis kapal untuk memastikan akurasi data. Serta melakukan kontrol kualitas data dan verifikasi ulang data kapal yang diinput ke dalam sistem untuk meminimalkan kesalahan human error.
- f. *Environment*: Memanfaatkan teknologi dan sistem online untuk mengoptimalkan operasional kapal dan penerbitan SPB. Meningkatkan infrastruktur jaringan internet di pelabuhan untuk memastikan koneksi yang stabil dan lancar.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pengamatan yang dilakukan selama Praktik Darat (Prada) di PT. Taraka Samudra Sejahtera maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Mengenai permasalahan pada hambatan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sering dijumpai adalah masalah kelalaian atau ketidak telitian dalam memonitor dokumen kapal, sebaiknya pihak pemohon penerbitan SPB harus memeriksa semua dokumen kapal jauh-jauh hari sebelum keberangkatan kapal karena saat proses *clearance out* semua dokumen dalam masa aktif dan apabila ada yang *expired* harus diperpanjang terlebih dahulu.
2. PT. Taraka Samudra Sejahtera perlu lebih menekankan *reward and punishment* yang efektif pada karyawan agar diharapkan dapat memotivasi serta untuk meningkatkan efisiensi dan kelancaran dalam penerbitan SPB dan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan mengurangi hambatan yang ada, serta menjadi pendorong untuk memperbaiki diri dan meningkatkan fokus mereka.

REFERENSI

- Budiawati, O., & Hartanto, C. F. B. (2020). Upaya Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Dalam Peningkatan Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Politeknik Bumi Akpelni.
- Darmadi, H. (2013). Metode penelitian pendidikan dan sosial. Alfabeta.
- Djewed, N. (2020). Penerbitan surat persetujuan berlayar kapal perikanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai. *Jurnal Yustisiabel*, 4(1), 1–13.
- Faisal, B. A. (2017). Analisa proses bisnis pada proses perbaikan kapal di galangan kapal PT. Dewa Ruci Agung Surabaya. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Gunawan, T., Kurniawan, R., & Muhddis. (2023). Implementasi kebijakan tentang penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) (studi pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe). *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 10, 155–166. Diakses pada 15 Februari 2024.
- Hamidi. (2010). Metode penelitian kualitatif: Pendekatan praktis penulisan proposal dan laporan penelitian. UMM Press.
- Info Maritim. (2020). Transportasi laut pegang peranan strategis untuk merajut keberagaman Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jakarta: Media Internal Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. <https://dephub.go.id/post/read/transportasi-laut-pegang-peranan-strategis-untuk-merajut-keberagaman-indonesia-dan-mendorong-pertumbuhan-ekonomi> Diakses pada 15 Februari 2024.
- KBBI. (2023). Kamus besar bahasa Indonesia (Versi online). Diakses pada 09 Maret 2024.
- Keraf, G. (1994). Komposisi: Sebuah pengantar kemahiran bahasa. Nusa Indah.
- Moleong, J. L. (2009). Metode penelitian kualitatif. PT. Remaja Rosdakaya.
- Nurrohman, B. (2017). Optimalisasi pelayanan e-KTP guna meningkatkan validitas data kependudukan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. *Jurnal* 10(6). <https://stisipbantenraya.ac.id/index.php/download/category/7-jurnal-vol-10-no6-maret-2017> Diakses pada 18 Mei 2024.
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
- Peraturan Perundang-undangan:
- Sugiyono. (2007). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.
- Sugiyono. (2010). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). Memahami penelitian kualitatif. Alfabeta.

- Suharso, & Retnoningsih, A. (2005). Kamus besar bahasa Indonesia. Widya Karya.
- Suwarno, B. (2011). Manajemen pemasaran jasa perusahaan pelayaran.
- Syah, M. R. (2022). Analisis proses clearance in and out kapal pada perusahaan PT. Adhigana Pratama Mulya Cabang Palu. 1–39.
- Tarunizidat. (2018). Tentang kapal yang memasuki daerah pelabuhan.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Wiratna Sujarweni, V. (2018). Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi: Pendekatan kuantitatif. Pustaka Baru Press.
- Zuldafrial, M. (2012). Penelitian kualitatif. Yuma Pustaka.